



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/260/2025**

TENTANG

**PENETAPAN REGISTER RISIKO PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 serta untuk mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dilakukan penetapan Register Risiko Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, telah disusun dokumen Register Risiko yang memuat informasi risiko signifikan beserta rencana mitigasinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Register Risiko Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Register Risiko Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Register Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat daftar risiko strategis, risiko operasional, risiko kemitraan dan risiko fraud dari setiap Perangkat Daerah, disertai dengan penilaian tingkat risiko, penyebab, dampak, pengendalian yang telah ada, serta rencana tindak pengendalian lanjutan.
- KETIGA : Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko-risiko yang telah ditetapkan serta melaporkan hasil pemantauan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan setiap triwulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Agustus 2025



PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: KABUPATEN BARITO SELATAN	
Tahun	: 2025	
Periode	: 2023-2026	
Urusan Pemerintahan	: PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
OPD	: BAPPERIDA	
Sumber Data	Rencana Strategis	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya Daya Saing Daerah	
Sasaran Strategis (tebalkan sasaran yang dipilih)	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	
IKU Renstra OPD (tebalkan yang dipilih)	IKU	Target 2025
	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria B	B
	2. Opini BPK	WTP
	3. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	80
	4. Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100%
	5. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA	Inovatif
	6. Jumlah Kajian Kelitbangan yang di implementasikan	1 Kajian
Informasi lain		
		Buntok, Januari 2025 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  JAYA WARDANA AP, SE.,M.Ec.Dev PEMBINA TINGKAT I NIP. 19740702 199403 1 011

Nama Pemda	:	KABUPATEN BARITO SELATAN
Tahun	:	2025
Periode	:	2023-2026
Urusan Pemerintahan	:	PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
OPD	:	BAPPERIDA
Sumber Data		
Tujuan Strategis	1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik
	2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah
Sasaran Strategis (tebalkan sasaran yang dipilih)	1.	Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat
	2.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah
Informasi Lain		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator	1.	PROGRAM
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2.	Kegiatan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	3.	Sub kegiatan
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	4.	Indikator
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		
	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota		
	Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2025
Sub Kegiatan (tebalkan yang dipilih)	1. Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
	2. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen
Informasi Lain			
		Buntok, Januari 2025 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  JAYA WARDANA AP, SE.,M.Ec.Dev PEMBINA TINGKAT I NIP. 19740702 199403 1 011	

Nama Pemda	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	
Tahun	: 2024	
Periode	: 2023-2026	
Urusan Pemerintahan OPD	: 1) PERENCANAAN; 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Sumber Data	: BAPPERIDA	
Tujuan Strategis	1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik 2) Meningkatnya Daya Saing Daerah	
Program (Renja Tahun 2024) dan Kegiatan Utama	1) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2) Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
Keluaran/Hasil Kegiatan	2	Dokumen
	1	Dokumen
Informasi Lain		
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
		Buntok, Januari 2025 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.Dev PEMBINA TINGKAT I NIP. 19740702 199403 1 011

Identifikasi Risiko Strategi OPD

Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Perencanaan

Periode yang dinilai

Tujuan Strategis

Uraian Pemertintahan

OPD yang dinilai

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BAPPERIDA

2025

2023-2026

Memperkuat Daya Saing Daerah

1) PERENCANAAN, 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Tupuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik/ Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Ketersesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RPJPD)	Ketidakefisienan/Inkonsistensi Antar Dokumen Perencanaan	RSO.25.35.24.01	Kepala Badan	1. Proses penyusunan dokumen yang tidak partisipatif dan kurang koordinasi antar OPD. 2. Perubahan kebijakan nasional/daerah yang tidak diantisipasi dengan baik 3. Data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan tidak akurat atau tidak up-to-date 4. Keterbatasan pemahaman SDM perencanaan tentang regulasi dan metodologi perencanaan	Internal dan Eksternal	C	1. Perencanaan yang tidak efektif dan efisien 2. alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 3. pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal	Pemerintah Daerah, Bappeda, OPD, Masyarakat
2	Memperkuat Daya Saing Daerah / Meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat	Indeks Inovasi Daerah pada Pendataan IGA	Rendahnya Tingkat Inovasi Daerah	RSO.25.35.24.02	Kepala Badan	1. Kurangnya budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat 2. Keterbatasan sumber daya anggaran, SDM, infrastruktur untuk mendukung inovasi 3. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar stakeholder dalam pengembangan inovasi	Internal dan Eksternal	C	1. Daya saing daerah yang rendah 2. pertumbuhan ekonomi lambat	Perangkat Daerah dan Masyarakat
			Implementasi Inovasi yang Tidak Efektif	RSO.25.35.24.03	Kepala Badan	1. Kurangnya perencanaan dan pengujian yang matang dalam implementasi inovasi 2. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan stakeholder terkait 3. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi 4. Resistensi terhadap perubahan dari internal organisasi	Internal dan Eksternal	C	inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan daya saing daerah	Pemerintah Daerah, Bappeda, OPD, Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis uraian yang sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Resatras

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko eksternal/internal

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk menanggulangi penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu menanggulangi risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kesehatan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Nama OPD : BAPPERIDA
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : 2023-2026
Tujuan Strategis : Meningkatkan Daya Saing Daerah
Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat
Urutan Pemerintahan : 1) PERENCANAAN, 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko		Penilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan	Kualitas Dokumen Perencanaan Kurang Memadai	ROO 24 35 24 01	Kepala Bidang Litbang Perencanaan Program dan Pengendalian	1. Kualitas SDM perencana yang kurang memadai. 2. Metodologi perencanaan yang kurang tepat 3. Data dan informasi yang digunakan kurang valid atau tidak up-to-date 4. Kurangnya review dan validasi terhadap dokumen perencanaan.	Internal dan Eksternal	C	1. Perencanaan yang tidak efektif dan efisien 2. alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 3. pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal	Pemerintah Daerah, OPD, Masyarakat.
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang difasilitasi dalam pengembangannya	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tidak Sesuai Target	ROO 24 35 24 02	Kepala Bidang Litbang Perencanaan Program dan Pengendalian	1. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang spesifik inovasi yang dikembangkan. 2. Perubahan prioritas atau kebijakan di tengah proses pengembangan. 3. Kendala teknis atau masalah pada infrastruktur pendukung (misalnya, laboratorium, peralatan). 4. Kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal yang terlibat	Internal dan Eksternal	C	1. Target persentase Inovasi yang difasilitasi tidak tercapai 2. penundaan implementasi inovasi	Bappeda, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pihak Terlibat Pengembangan Inovasi.
			Hasil Inovasi dan Teknologi Kurang Berkualitas atau Tidak Berkelanjutan	ROO 24 35 24 03	Kepala Bidang Litbang Perencanaan Program dan Pengendalian	1. Proses penelitian dan pengembangan yang kurang mendalam atau tidak metodologis. 2. Kurangnya review dan validasi terhadap hasil inovasi. 3. Kurangnya perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan dampak jangka panjang inovasi 4. Tidak ada mekanisme transfer knowledge dan diseminasi hasil inovasi.	Internal dan Eksternal	C	Inovasi yang dihasilkan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat atau daerah	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Bappeda.

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Penilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Identifikasi Risiko Fraud OPD

Nama Pemda
Nana OPD
Tahun Perencanaan
: 2025
: 2023-2026
Tujuan Strategis
: Meningkatkan Daya Saing Daerah
Sasaran strategis OPD
: Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat
Urusan Pemerintahan
: 1) PERENCANAAN; 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Gambaran Umum	Tahapan Proses	Risiko			Penilik	Uraian	Sumber	C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena
					Uraian	Kode Risiko	Uraian					Uraian		
1	Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD adalah proses terencana dan berjalan untuk memastikan pembangunan daerah terarah, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dokumen ini menjadi landasan hukum, strategis, dan teknis dalam pembangunan daerah.	Persiapan, perumusan, analisis strategis, penyusunan draft, Musrenbang, Evaluasi dan penetapan.	Manipulasi Data/Informasi dalam Dokumen Perencanaan	RFO.25.35.24.0 1	1. Tekanan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. 2. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin diakomodasi dalam dokumen perencanaan. 3. Kurangnya review dan validasi data/informasi yang digunakan	Kepala Badan	1. Tekanan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. 2. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin diakomodasi dalam dokumen perencanaan. 3. Kurangnya review dan validasi data/informasi yang digunakan	Internal dan Eksternal	C	1. Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 2. program dan kegiatan pembangunan yang tidak efektif dan efisien		Masyarakat, Pemerintah Daerah, Bappeda
					Penyalahgunaan Anggaran	RFO.25.35.24.0 2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan, kurangnya pengawasan internal, atau adanya kolaborasi antara pejabat terkait dengan pihak ketiga untuk mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi	Kepala Badan	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan, kurangnya pengawasan internal, atau adanya kolaborasi antara pejabat terkait dengan pihak ketiga untuk mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi	Internal dan Eksternal	C	Mengarah pada pemborosan anggaran, proyek pembangunan yang tidak terealisasi atau tidak sesuai dengan perencanaan		BAPPEDA
					Pengalihan Prosedur atau Pengawasan	RFO.25.35.24.0 3	Kurangnya pengawasan atau kontrol dalam setiap tahapan proses perencanaan atau penetapan dokumen	Kepala Badan	Kurangnya pengawasan atau kontrol dalam setiap tahapan proses perencanaan atau penetapan dokumen	Internal dan Eksternal	C	Terjadinya penyelewengan atau penyimpangan tanpa terdeteksi, yang berpotensi merugikan negara dan merusak reputasi lembaga pemerintahan		BAPPEDA
2	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penyusunan dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perencanaan (litbangas) di bidang teknologi dan inovasi adalah proses sistematis untuk merekam, mengolah, dan menyajikan hasil kegiatan ilmiah. Dokumen ini berfungsi sebagai laporan ilmiah, panduan teknis, atau	Perencanaan Awal, Penyusunan Metodologi, Pelaksanaan Penelitian atau Perencanaan, Pembahasan, Penyimpulan dan Rekomendasi, Penyusunan Dokumen Akhir, Validasi dan Penyebaran.	Manipulasi Data/Hasil Penelitian	RFO.25.35.24.0 4	Tekanan untuk mencapai target penelitian yang tidak realistis	Kepala Badan	Tekanan untuk mencapai target penelitian yang tidak realistis	Internal dan Eksternal	C	1. Hasil penelitian yang tidak valid dan tidak dapat diandalkan 2. Alokasi anggaran penelitian yang tidak efektif 3. pengembangan inovasi yang tidak tepat sasaran		Bappeda, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Penelitian yang bekerjasama

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Huklum
Kolom l diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hasil Analisis Risiko

Nama OPD		BAPPERIDA			
Tahun		2025			
Tujuan Strategis Pemda		Meningkatnya Daya Saing Daerah			
Tujuan Strategis OPD		Meningkatkan Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat			
Tujuan Operasional OPD					
Urusan Pemerintahan		1) PERENCANAAN, 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
a	b		Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
I	Risiko Strategis OPD:	c	d	e	f
	Ketidaksesuaian/Inkonsistensi Antar Dokumen Perencanaan	RSO.24.35.24.01	2	3	10
	Rendahnya Tingkat Inovasi Daerah	RSO.24.35.24.02	2	3	10
	Implementasi Inovasi yang Tidak Efektif	RSO.24.35.24.03	2	3	10
II	Risiko Operasional OPD				
	Kualitas Dokumen Perencanaan Kurang Memadai	ROO.24.35.24.01	2	3	10
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tidak Sesuai Target	ROO.24.35.24.02	2	3	10
	Hasil Inovasi dan Teknologi Kurang Berkualitas atau Tidak Berkelanjutan	ROO.24.35.24.03	2	3	10
III	Risiko Fraud OPD				
	Manipulasi Data/Informasi dalam Dokumen Perencanaan	RFO.25.35.24.01	3	3	14
	Penyalahgunaan Anggaran	RFO.25.35.24.02	3	3	14
	Pengabaian Prosedur atau Pengawasan	RFO.25.35.24.03	3	3	14
	Manipulasi Data/Hasil Penelitian	RFO.25.35.24.04	3	3	14

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Daftar Risiko Prioritas						
Nama OPD		: BAPPEDA				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya Daya Saing Daerah				
Urusan Pemerintahan		: 1) PERENCANAAN; 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis OPD:						
	Ketidaksesuaian/Inkonsistensi Antar Dokumen Perencanaan	RSO.24.35.24.01	10	Kepala Badan	1. Proses penyusunan dokumen yang tidak partisipatif dan kurang koordinasi antar OPD. 2. Perubahan kebijakan nasional/daerah yang tidak diantisipasi dengan baik 3. Data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan tidak akurat atau tidak up-to-date. 4. Keterbatasan pemahaman SDM perencanaan tentang regulasi dan metodologi perencanaan.	1. Perencanaan yang tidak efektif dan efisien 2. alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 3. pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal
	Rendahnya Tingkat Inovasi Daerah	RSO.24.35.24.02	10	Kepala Badan	1. Kurangnya Dukungan Kebijakan 2. Keterbatasan Sumber Daya 3. Terbatasnya dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan inovasi secara berkelanjutan. 4. Tidak Adanya Kolaborasi 5. Resistensi terhadap Perubahan 6. Adanya sikap konservatif atau ketidakmauan untuk mengadopsi teknologi dan metode baru di kalangan pemangku kepentingan.	1. Daya saing daerah yang rendah 2. pertumbuhan ekonomi lambat
	Implementasi Inovasi yang Tidak Efektif	RSO.24.35.24.03	10	Kepala Badan	1. Kurangnya perencanaan dan persiapan yang matang dalam implementasi inovasi. 2. Kurangnya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan stakeholder terkait. 3. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi inovasi 4. Resistensi terhadap perubahan dari internal organisasi.	inovasi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan daya saing daerah
II Risiko Operasional OPD:						
	Kualitas Dokumen Perencanaan Kurang Memadai	ROO.24.35.24.01	10	Kepala Badan	1. Kualitas SDM perencanaan yang kurang memadai. 2. Metodologi perencanaan yang kurang tepat 3. Data dan informasi yang digunakan kurang valid atau tidak up-to-date 4. Kurangnya review dan validasi terhadap dokumen perencanaan.	1. Perencanaan yang tidak efektif dan efisien 2. alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 3. pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tidak Sesuai Target	ROO.24.35.24.02	10	Kepala Badan	1. Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang spesifik inovasi yang dikembangkan. 2. Perubahan prioritas atau kebijakan di tengah proses pengembangan. 3. Kendala teknis atau masalah pada infrastruktur pendukung (misalnya, laboratorium, peralatan). 4. Kurangnya koordinasi dengan pihak eksternal yang terlibat	1. Target persentase inovasi yang difasilitasi tidak tercapai 2. penundaan implementasi inovasi
	Hasil Inovasi dan Teknologi Kurang Berkualitas atau Tidak Berkelanjutan	ROO.24.35.24.03	10	Kepala Badan	1. Proses penelitian dan pengembangan yang kurang mendalam atau tidak metodologis. 2. Kurangnya review dan validasi	Inovasi yang dihasilkan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat atau daerah
III Risiko Fraud OPD:						
	Manipulasi Data/Informasi dalam Dokumen Perencanaan	RFO.25.35.24.01	14	Kepala Badan	1. Tekanan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. 2. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin diakomodasi dalam dokumen perencanaan. 3. Kurangnya review dan validasi data/informasi yang digunakan	1. Alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran 2. program dan kegiatan pembangunan yang tidak efektif dan efisien

	Penyalahgunaan Anggaran	RFO.25.35.24.02	14	Kepala Badan	Tekanan untuk mencapai target penelitian yang tidak realistis	1. Hasil penelitian yang tidak valid dan tidak dapat diandalkan 2. Alokasi anggaran penelitian yang tidak efektif 3. pengembangan inovasi yang tidak tepat sasaran
	Pengabaian Prosedur atau Pengawasan	RFO.25.35.24.03	14	Kepala Badan	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan, kurangnya pengawasan internal, atau adanya kolaborasi antara pejabat terkait dengan pihak ketiga untuk mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi	Mengarah pada pemborosan anggaran, proyek pembangunan yang tidak terealisasi atau tidak sesuai dengan perencanaan
	Manipulasi Data/Hasil Penelitian	RFO.25.35.24.04	14	Kepala Badan	Kurangnya pengawasan atau kontrol dalam setiap tahapan proses perencanaan atau penetapan dokumen	Terjadinya penyelewengan atau penyimpangan tanpa terdeteksi, yang berpotensi merugikan negara dan merusak reputasi lembaga pemerintahan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama OPD : BAPPERIDA							
Tahun Penilaian : 2025							
Tujuan Strategis : 1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatnya Daya Saing Daerah							
Urutan Pemerintahan : 1) PERENCANAAN; 2) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Urutan Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis OPD:							
	Ketidaksihonestan/Inkonsistensi Antar Dokumen Perencanaan	RSO.24.35.24.01	1. Penyusunan anggaran berdasarkan tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. 2. Monitoring konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dan RPJMD	1. Perubahan kondisi ekonomi atau sosial yang tidak diakomodasi dalam RPJMD, sehingga menyebabkan penyesuaian anggaran yang tidak sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan. 2. Proses monitoring yang dilakukan untuk memeriksa konsistensi antara RKPD dan RPJMD tidak dilakukan secara rutin atau sistematis. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi ketidaksesuaian antara program yang dilaksanakan dengan tujuan jangka panjang yang ada dalam RPJMD.	1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui forum-forum koordinasi dan konsultasi publik. 2. Melakukan analisis dan antisipasi terhadap perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3. Memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan up-to-date melalui sistem informasi perencanaan yang terintegrasi. 4. Meningkatkan kapasitas SDM perencana melalui pelatihan,	BAPPERIDA	12 Bulan
	Bendahnya Tingkat Inovasi Daerah	RSO.24.35.24.02	Inventarisasi inovasi secara berkala	Tidak adanya panduan atau prosedur standar operasional (SOP) untuk melakukan inventarisasi inovasi secara berkala.	Mendorong pembentukan budaya inovasi melalui program-program 1. pelatihan, workshop, dan kompetisi inovasi. 2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan litbang dan inovasi. 3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas dalam	BAPPERIDA	12 Bulan
	Implementasi Inovasi yang Tidak Efektif	RSO.24.35.24.03	Identifikasi risiko awal dalam tahap perencanaan untuk memastikan kelayakan inovasi.	Tidak dilakukan analisis risiko secara mendalam pada tahap perencanaan, sehingga inovasi gagal mengantisipasi potensi hambatan	Melakukan perencanaan dan 1.persiapan yang matang sebelum implementasi inovasi, termasuk analisis kelayakan, business plan, dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan.	BAPPERIDA	12 Bulan
II Risiko Operasional							
	Kualitas Dokumen Perencanaan Kurang Memadai	ROO.24.35.24.01	1. Penyusunan anggaran berdasarkan tema pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. 2. Monitoring konsistensi program dan kegiatan antara RKPD dan RPJMD	1. Ketidaktepatan Prioritas Anggaran 2. Monitoring dilakukan secara manual atau tidak terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.	1. Mengintegrasikan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan kebijakan pusat dan daerah melalui forum konsultasi berkala. 2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Membuat indikator kinerja utama (IKU) yang terukur untuk memantau arah pembangunan. 3. Melakukan uji konsistensi sebelum kebijakan diterapkan untuk menghindari konflik atau duplikasi 4. Menetapkan SOP yang jelas dalam penyusunan	BAPPERIDA	12 Bulan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tidak Sesuai Target	ROO.24.35.24.02	Pelibatan pihak internal dan eksternal (stakeholder, akademisi, industri) untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan inovasi.	Tidak ada identifikasi dan mitigasi risiko yang terencana dalam pengembangan inovasi dan teknologi.	1.Melakukan identifikasi kebutuhan SDM secara detail dan merekrut atau melatih SDM yang kompeten. 2. Memastikan adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan terhadap program pengembangan inovasi. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pengembangan inovasi. 4. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak eksternal	BAPPERIDA	12 Bulan
	Hasil Inovasi dan Teknologi Kurang Berkualitas atau Tidak Berkelanjutan	ROO.24.35.24.03	Inovasi dan teknologi diuji dalam beberapa tahap untuk memastikan kualitas dan fungsionalitasnya.	Inovasi sulit untuk terus digunakan atau diperbarui.	1. Menerapkan standar kualitas yang jelas dalam proses penelitian dan pengembangan 2. Melibatkan ahli atau pihak independen untuk melakukan review dan validasi terhadap hasil inovasi	BAPPERIDA	12 Bulan

III Risiko Fraud OPD:							
Manipulasi Data/Informasi dalam Dokumen Perencanaan	RPO.25.35.24.01	Sinkronisasi dan koordinasi dengan perangkat daerah secara berkala	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyelarasan Proses Perencanaan, menggunakan sistem perencanaan berbasis digital untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasi dokumen serta koordinasi dan Konsultasi Berkala: Melibatkan pemangku kepentingan dalam forum diskusi untuk menyelaraskan isi dokumen sebelum finalisasi. 2. Membuat timeline penyusunan dokumen dengan pembagian tanggung jawab yang jelas di setiap tahapan.	BAPPERIDA	12 Bulan	
Penyalahgunaan Anggaran	RPO.25.35.24.02	Penyelarasan anggaran dengan tema pembangunan yang disepakati bersama	Alokasi anggaran menjadi tidak tepat sasaran, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.	Menerapkan sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap	BAPPERIDA	12 Bulan	
Pengawasan Prosedur atau Pengawasan	RPO.25.35.24.03	Terdapat SOP yang mengatur langkah-langkah kerja untuk memastikan prosedur dijalankan dengan benar.	Kurangnya pemahaman atau kesadaran pegawai akan pentingnya SOP	Menambah jumlah pengawas atau mendelegasikan tugas pengawasan ke tim khusus untuk memastikan implementasi prosedur.	BAPPERIDA	12 Bulan	
Manipulasi Data/Hasil Penelitian	RPO.25.35.24.04	Penelitian dilakukan berdasarkan pedoman penelitian yang telah distandarisasi, termasuk prosedur dan aturan etik yang mengatur pengumpulan, analisis, dan pelaporan data.	Belum dilakukan audit terhadap proses penelitian oleh auditor internal atau eksternal untuk memverifikasi integritas data dan hasil penelitian.	1. Menerapkan standar metodologi penelitian yang ketat dan transparan. 2. Melibatkan ahli atau pihak independen untuk melakukan review dan validasi terhadap proposal dan hasil penelitian. 3. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian, termasuk monitoring dan evaluasi berkala. 4. Menerapkan peer	BAPPERIDA	12 Bulan	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan.

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIRANGUN							
Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET DAERAH							
Tahun : 2025							
Periode yang diteliti : 2023-2026							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Rapat dan Koordinasi, FGD, Pedoman Teknis Perencanaan	1. Lokakarya, diskusi panel, atau grup kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. 2. Platform Digital: Sistem perencanaan berbasis aplikasi untuk berbagi dokumen dan data antar tingkat pemerintahan.	BAPPERIDA	Perangkat daerah, masyarakat	Januari-Februari	Maret-Desember	
2	1. Mengadakan workshop, seminar, atau forum nasional dan daerah untuk menyampaikan arah kebijakan dan mendiskusikan aksi inovasi. 2. Portal Online atau Aplikasi: Untuk memfasilitasi informasi, hasil inovasi, dan peluang kolaborasi antar lembaga.	1. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan inovasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya inovasi berkelanjutan. 2. Kampanye video, artikel, atau infografik yang menjelaskan keberhasilan inovasi untuk menarik dukungan masyarakat dan investor.	BAPPERIDA	Perangkat daerah, masyarakat dan investor	Januari - April	Mei-Desember	
3	Rapat dan Koordinasi, FGD, Pedoman Teknis Perencanaan	1. Lokakarya, diskusi panel, atau grup kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. 2. Platform Digital: Sistem perencanaan berbasis aplikasi untuk berbagi dokumen dan data antar tingkat pemerintahan.	BAPPERIDA	Perangkat daerah, masyarakat	Januari-Februari	Maret-Desember	
4	Koordinasi lintas sektoral, Penyeragaman Kebijakan, Penggunaan Sistem Digital Terpadu, Review dan Validasi Dokumen	1. Lokakarya, diskusi panel, atau grup kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. 2. Platform Digital: Sistem perencanaan berbasis aplikasi untuk berbagi dokumen dan data antar tingkat pemerintahan.	BAPPERIDA	Perangkat daerah, masyarakat	Januari-Februari	Maret-Desember	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RUSET DAERAH						
: 2025						
: 2023-2026						
: Nama OPD						
: Tahun Penilaian						
: Periode						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rapat dan Koordinasi, FGD, Pedoman Teknis Perencanaan	1. Penyusunan Agenda Rapat; 2. Menggunakan notulen rapat	BAPPERIDA	TW. IV TAHUN 2025	Maret-Desember	
2	1. Mengadakan workshop, seminar, atau forum nasional dan daerah untuk menyampaikan arah kebijakan dan mendiskusikan solusi inovasi. 2. Portal Online atau Aplikasi: Untuk mendistribusikan informasi, hasil inovasi, dan peluang kolaborasi antar lembaga.	Laporan hasil workshop, seminar, atau forum nasional dan daerah untuk menyampaikan arah kebijakan dan mendiskusikan solusi inovasi	BAPPERIDA	TW. IV TAHUN 2026	Mei-Desember	
3	Rapat dan Koordinasi, FGD, Pedoman Teknis Perencanaan	1. Penyusunan Agenda Rapat; 2. Menggunakan notulen rapat	BAPPERIDA	TW. IV TAHUN 2027	Maret-Desember	
4	Koordinasi lintas sektoral, Penyelarasan Kebijakan, Penggunaan Sistem Digital Terpadu, Review dan Validasi Dokumen	Rapat/Forum Koordinasi lintas sektoral, Penyelarasan Kebijakan, Penggunaan Sistem Digital Terpadu, Review dan Validasi Dokumen	BAPPERIDA	TW. IV TAHUN 2028	Maret-Desember	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

